

TUJUAN 2

Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target 3: Memastikan pada 2015 semua anak-anak di mana pun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.^a

Indikator:

- **Angka Partisipasi Murni di sekolah dasar.**
- **Angka Partisipasi Murni di sekolah lanjutan pertama.**
- **Proporsi murid yang berhasil mencapai kelas 5.**
- **Proporsi murid di kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar.**
- **Proporsi murid di kelas 1 yang berhasil menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar.**
- **Angka melek huruf usia 15–24 tahun.**

Keadaan dan kecenderungan

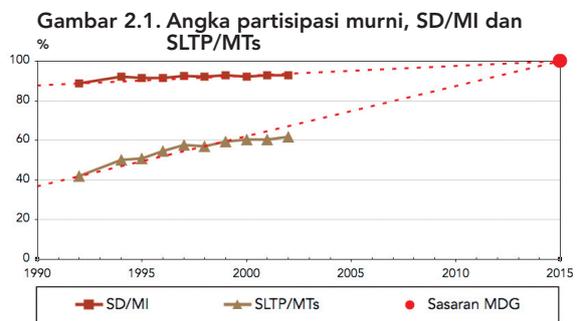
Pengantar. Untuk meningkatkan pembangunan suatu bangsa diperlukan *critical mass* di bidang pendidikan. Hal ini membutuhkan adanya persentase penduduk dengan tingkat pendidikan yang memadai untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang cepat. Program pendidikan dasar sembilan tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan *critical mass* itu dan membekali anak didik dengan ketrampilan dan pengetahuan dasar: untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, untuk bekal menjalani kehidupan dalam masyarakat, untuk membuat pilihan-pilihan dan memanfaatkan produk-produk berteknologi tinggi, untuk mengadakan interaksi dan kompetisi antar warga masyarakat, kelompok, dan antar bangsa.

Target. Target MDG adalah menjamin bahwa sampai dengan 2015, semua anak, di mana pun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar. Target itu sejalan dengan target Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yaitu

meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dengan indikator kinerja pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SLTP/MTs mencapai 90 persen persen paling lambat pada 2008, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar yang pada saat ini masih di bawah standar nasional.

Angka partisipasi

Angka partisipasi tingkat sekolah dasar. Data Susenas menunjukkan adanya perbaikan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI untuk anak usia 7–12 tahun dari 88,7 persen pada 1992 menjadi antara 92–93 persen selama tiga tahun terakhir (Gam-



Sumber: Susenas

^a Indonesia menetapkan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun: enam tahun di sekolah dasar (anak usia 7–12 tahun) dan tiga tahun di SLTP (anak usia 13–15 tahun). Dengan demikian, sasaran MDG untuk Indonesia lebih tinggi dari pada standar internasional untuk pendidikan dasar.

bar 2.1). Sementara itu, Data Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan APM yang lebih tinggi, yaitu 94 persen. Perbedaan angka antara Susenas dan data Depdiknas dapat terjadi karena sistem pendataan yang berbeda. Pertama, Susenas menggunakan pendataan berdasarkan tempat tinggal, sementara Depdiknas menggunakan data dari laporan sekolah yang memungkinkan terjadinya penghitungan ganda karena adanya anak yang sekolah di lebih dari satu tempat. Kedua, waktu pelaksanaan yang berbeda; data Depdiknas adalah data pendaftaran pada awal tahun ajaran baru, sedangkan Susenas tidak selalu pada tahun ajaran baru.

Angka Partisipasi Kasar. Angka Partisipasi Murni juga berbeda cukup signifikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Menurut data Depdiknas, pada 2002 APK SD/MI telah mencapai 112 persen, secara signifikan lebih besar dibanding APM yang baru 94 persen. Hal itu menunjukkan banyaknya siswa yang berusia di bawah tujuh tahun (*underage*) dan di atas 12 tahun (*overage*). Data Depdiknas menunjukkan bahwa siswa SD/MI yang berusia kurang dari tujuh tahun sebesar 10,3 persen dan siswa yang berusia di atas 12 tahun sebanyak 4,9 persen. Dengan dimungkinkannya anak usia di bawah tujuh tahun untuk mengikuti pendidikan di SD/MI, maka jumlahnya cenderung meningkat, terutama di daerah perkotaan. Di sisi lain, adanya anak-anak usia di atas 12 tahun yang masih di SD disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, anak-anak itu masuk SD di atas usia tujuh tahun, misalnya pada 2000/2001 ada sekitar 42,2 persen murid baru kelas I SD/MI yang berusia delapan tahun ke atas. Kedua, adanya anak-anak yang mengulang kelas, sehingga mereka baru dapat menyelesaikan SD pada usia di atas 12 tahun.

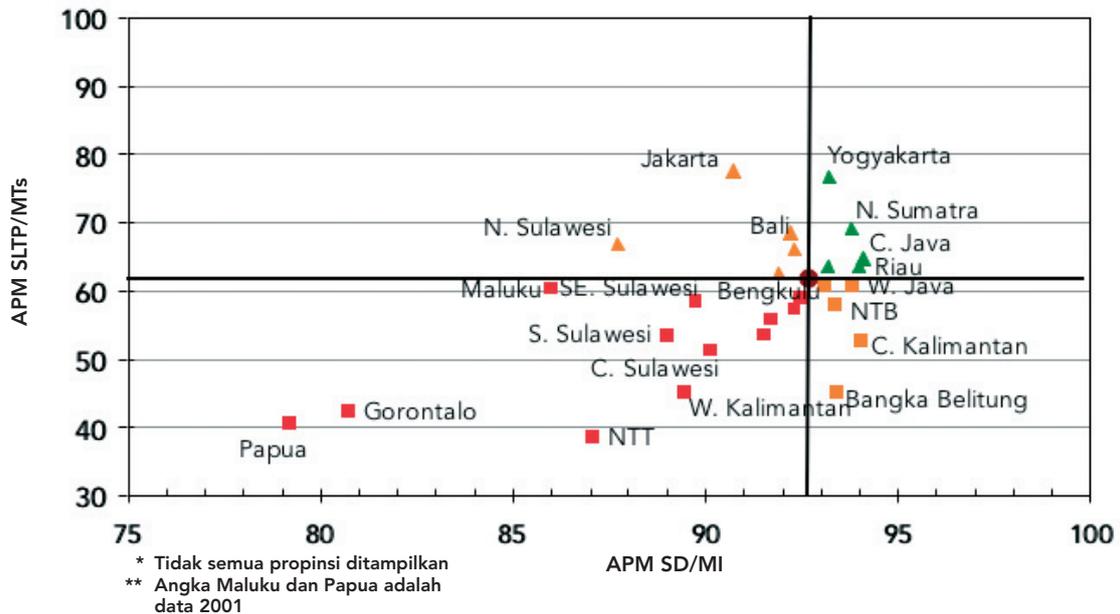
Disparitas APM dan APK SD/MI. Analisis lebih lanjut berdasarkan data Susenas 2002 diketahui bahwa APM dan APK SD/MI yang tinggi terjadi pada semua kelompok masyarakat. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara daerah pedesaan dan perkotaan, antara laki-laki dan perempuan, dan antar kelompok ekonomi masyarakat yang diukur menggunakan pengeluaran konsumsi keluarga (Tabel 2.2a dan 2.2b). Namun terdapat variasi APM di antara provinsi, bahkan beberapa provinsi memiliki APM di bawah 90 persen (Gambar 2.2 dan Tabel 2.1).

Sekolah lanjutan tingkat pertama dan madrasah tsanawiyah (SLTP/MTs). Akses pendidikan tingkat SLTP/MTs mengalami peningkatan secara signifikan selama dilaksanakannya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yaitu sejak 1994. APM jenjang SLTP/MTs naik dari 41,9 persen pada 1992 menjadi 61,6 persen pada 2002, sedangkan APK naik dari 65,7 persen pada 1995 menjadi 79,8 persen pada 2002 (Tabel 2.3). Namun angka partisipasi itu belum cukup tinggi untuk mencapai APK 90 persen sebagai target penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada 2008. Angka partisipasi di SLTP/MTs perlu diukur dengan menggunakan APK mengingat banyaknya murid yang berusia di bawah 13 tahun dan di atas 15 tahun yang bersekolah di tingkat ini.

Disparitas APM dan APK SLTP/MTs. Berbeda dengan jenjang SD/MI, partisipasi pendidikan jenjang SLTP/MTs menunjukkan masih adanya perbedaan antara pedesaan dan perkotaan serta antar kelompok pengeluaran konsumsi keluarga meskipun perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak tampak nyata^a (Tabel 2.4a, 2.4b). APM pedesaan baru

^a Lihat pembahasan Tujuan 3 tentang kesetaraan gender.

Gambar 2.2. Angka partisipasi murni SD/MI dan SLTP/MTs, 2002



Sumber: Susenas

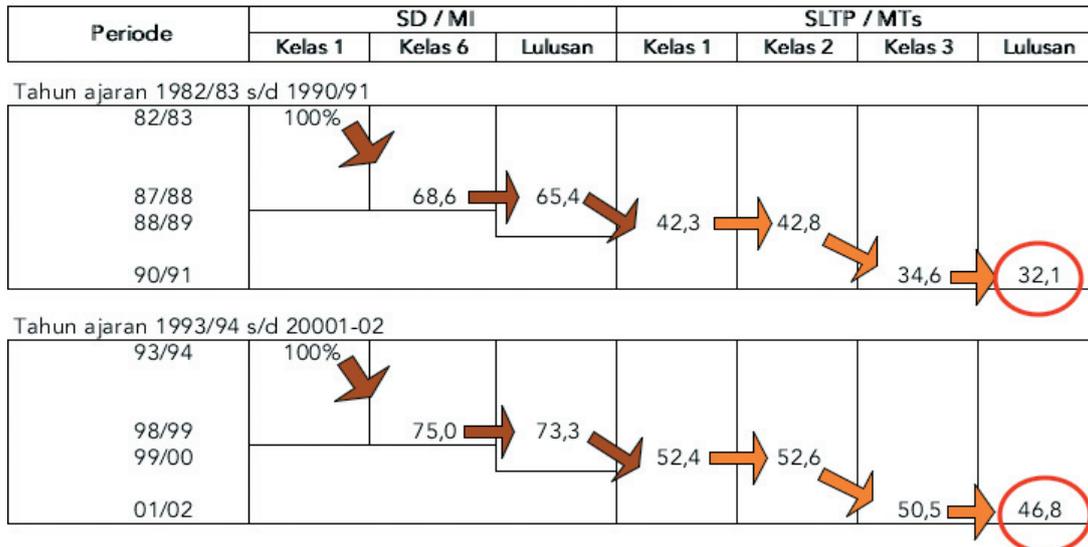
mencapai 54,1 persen, sementara daerah perkotaan 71,9 persen. Selanjutnya, APM kelompok 20 persen penduduk termiskin (kuantil 1) baru mencapai 49,9 persen, sangat berbeda tajam dengan kelompok terkaya (kuantil 5) yang telah mencapai 72,3 persen. APK SLTP/MTs juga bervariasi antara pedesaan (69,7 persen) dan perkotaan (93,5 persen), dan antara kelompok penduduk termiskin (64,8 persen) dengan kelompok penduduk terkaya (94,6 persen). Disparitas APM yang tajam juga terjadi antarprovinsi (Gambar 2.2). Masih banyak provinsi yang memiliki APM di bawah 60 persen seperti Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Data Susenas 2001 memperlihatkan APM 40,5 persen untuk Provinsi Papua.

Proporsi murid yang menyelesaikan pendidikan dasar

Murid yang dapat bertahan hingga kelas 5. Proporsi murid yang memulai pendidikannya dari kelas 1 dan dapat bertahan hingga kelas 5 meningkat dari 74,7 persen pada 1991 menjadi 82,2 persen pada 2002.

Angka kelulusan pendidikan dasar. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasarnya dan selanjutnya menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar, dapat dilihat pada arus siswa pendidikan dasar (Gambar 2.3), yang menunjukkan proporsi siswa yang menyelesaikan satu siklus pendidikan dasar tertentu. Gambar itu secara implisit

Gambar 2.3. Proporsi murid kelas 1 yang menyelesaikan pendidikan dasar (kohort)



Sumber: Departemen Pendidikan Nasional

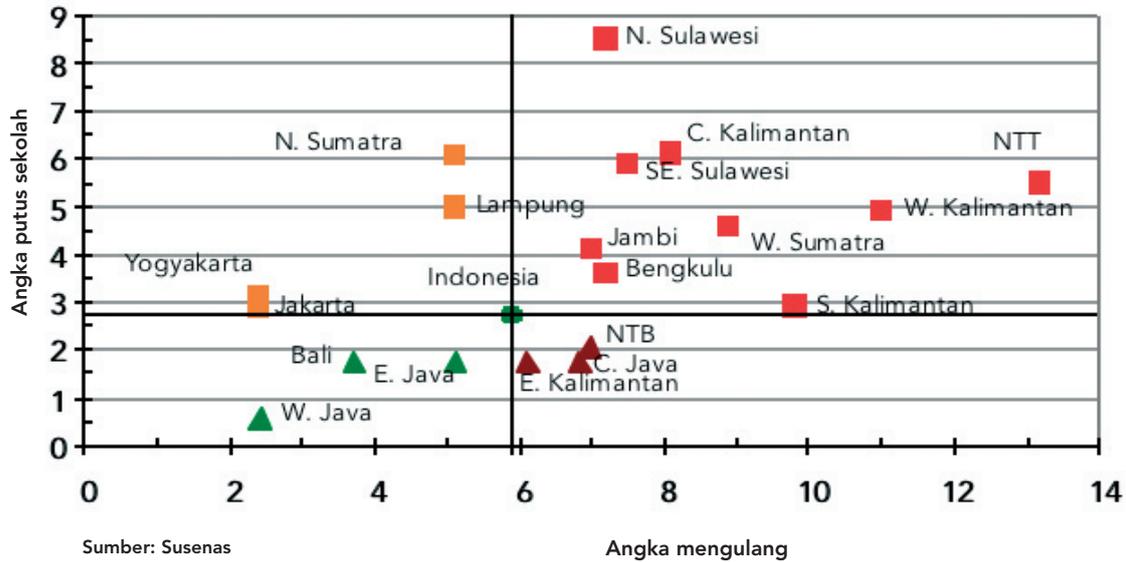
mengindikasikan tingkat kesuksesan pelaksanaan program wajib belajar serta kemajuan tingkat penyelesaian pendidikan dasar dalam kurun waktu 11 tahun. Dari data arus siswa yang masuk SD tahun 1982/1983, hanya 32,1 persen yang lulus dari SLTP pada 1990/1991, menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar. Sementara, 46,8 persen arus siswa yang masuk SD/MI pada 1993/1994 menyelesaikan pendidikan dasarnya pada 2001/2002.

Penyelesaian pendidikan dasar yang tidak tepat waktu. Masih besar proporsi anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dalam kurun waktu sembilan tahun. Dari seluruh siswa baru kelas 1 SD/MI pada 1982/1983 ada 67,9 persen yang tidak atau belum dapat menyelesaikannya dalam kurun waktu sembilan tahun. Fenomena serupa terjadi pada siklus 1993/94 sampai dengan 2001/02, 53,2 persen siswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar tepat waktu. Hal ini bisa terjadi karena: pertama, adanya siswa yang mengulang kelas sehingga membutuhkan waktu lebih dari sembilan tahun un-

tuk menyelesaikan pendidikan dasar; kedua, adanya siswa putus sekolah, baik di tingkat SD/MI maupun di SLTP/MTs, dan tidak masuk ke dalam lembaga pendidikan alternatif lain; dan ketiga, adanya lulusan SD/MI atau yang setara yang tidak melanjutkan ke SLTP/MTs atau ke lembaga setara yang menawarkan pendidikan luar sekolah. Mereka yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar, terutama yang terjadi di tingkat SD/MI merupakan faktor potensial untuk menjadi warga buta huruf.

Angka mengulang dan angka putus sekolah. Perbaikan tingkat penyelesaian pendidikan dasar dari dua arus siswa di atas (1982/83 dan 1993/94) dapat disebabkan oleh adanya penurunan angka mengulang kelas, penurunan angka putus sekolah, dan peningkatan angka melanjutkan dari SD/MI ke SLTP/MTs, atau kombinasi dari ketiganya. Kesemua perbaikan itu antara lain merupakan dampak positif dari program wajib belajar sembilan tahun yang telah dilakukan selama ini. Namun persentase lulusan SD/MI yang melanjutkan pendidikan ke tingkat

Gambar 2.4. Angka mengulang dan angka putus sekolah SD/MI dan SLTP/MTs, 2002



SLTP/MTs masih relatif rendah dan angka mengulang serta angka putus sekolah masih perlu diturunkan lagi. Pada 2000/2001 angka putus sekolah SD/MI sebesar 2,6 persen dan SLTP sebesar 0,3 persen. Pada saat yang sama angka mengulang SD sebesar 5,9 persen dan SLTP sebesar 0,3 persen. Perlu ada perhatian khusus pada tingginya angka mengulang kelas, khususnya di tingkat SD/MI, karena angka mengulang tidak hanya berpengaruh besar pada tingkat penyelesaian sekolah, tetapi juga berhubungan erat dengan angka putus sekolah (Gambar 2.4). Lembaga pendidikan alternatif perlu diefektifkan dan dibuat mudah terjangkau

oleh anak-anak usia 7–15 tahun yang putus sekolah dari SD/MI maupun dari SLTP/MTs.

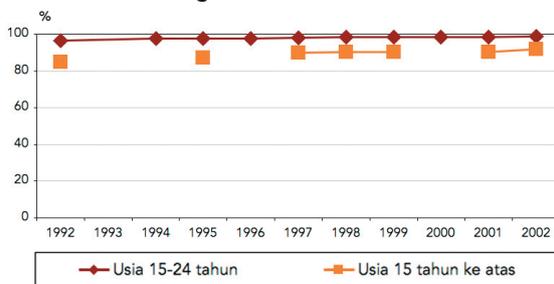
Variasi antarprovinsi. Gambar 2.4 menunjukkan bahwa kecilnya angka di tingkat nasional menyembunyikan kenyataan variasi angka mengulang dan putus sekolah di tingkat provinsi. Angka mengulang bervariasi dari 2,7 persen hingga 13,5 persen, sementara angka putus sekolah antara di bawah satu persen hingga di atas delapan persen.

Tingkat melek huruf penduduk

Tingkat melek huruf penduduk usia 15–24 tahun.

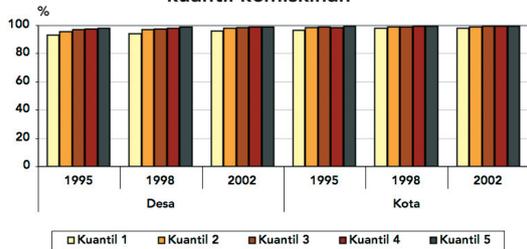
Secara nasional tingkat melek huruf penduduk usia 15–24 tahun ke atas meningkat dari 96,2 persen pada 1990 menjadi 98,7 persen pada 2002 (Tabel 2.5 dan Gambar 2.5). Penduduk yang masih buta huruf diperkirakan adalah mereka yang berada di daerah yang sulit dijangkau pelayanan pendidikan dan penyandang cacat. Perbaikan tingkat melek huruf pada kelompok usia ini disebabkan oleh meningkatnya

Gambar 2.5. Angka Melek Huruf



Sumber: Susenas

Gambar 2.6. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun menurut kota/desa dan kuantil kemiskinan

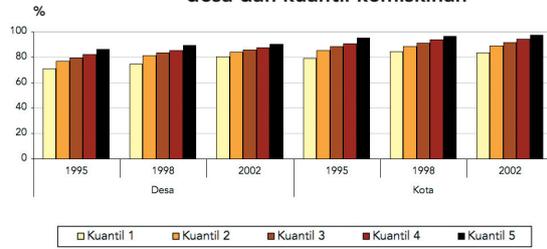


Sumber: Susenas

partisipasi pendidikan dasar serta meningkatnya proporsi siswa SD/MI yang dapat menyelesaikan sekolahnya sampai kelas 5. Proporsi siswa kelas 1 yang berhasil menyelesaikan sekolah sampai kelas 5 meningkat dari 74,7 persen pada 1991 menjadi 82,2 persen pada 2002. Memang masih terdapat perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara yang kaya dan yang miskin. Meskipun demikian, kesenjangan ini telah semakin sempit bila dibandingkan dengan keadaan pada 1995 (Gambar 2.6).

Tingkat melek huruf penduduk usia lanjut. Apabila kelompok usia diperluas menjadi 15 tahun ke atas, tingkat melek huruf penduduk menjadi lebih rendah. Meskipun demikian, peningkatan juga telah terjadi dari 87,1 persen pada 1995 menjadi 91,7 persen pada 2002 (Gambar 2.5). Disparitas yang besar juga terjadi pada kelompok umur ini, yaitu antara penduduk pedesaan dan perkotaan serta antara tingkat kemiskinan yang dihitung berdasarkan pengeluaran keluarga (Gambar 2.7). Dari tahun ke tahun, tingkat melek huruf telah meningkat di hampir semua kelompok. Migrasi dari desa ke kota diduga menjadi faktor pengaruh dalam mandeknya atau turunnya kecenderungan tingkat melek huruf di antara kelompok miskin kota dari 1998 ke 2002.

Gambar 2.7. Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kota/desa dan kuantil kemiskinan



Sumber: Susenas

Tantangan

Walaupun pelaksanaan program pendidikan dasar sembilan tahun, khususnya pada empat tahun pertama sejak dicanangkan, dapat dikatakan berhasil, terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang harus diselesaikan, sebagaimana dibahas dalam bagian sebelumnya. Karena itu, kebijakan, strategi, dan program penuntasan program pendidikan dasar sembilan tahun yang akan datang hendaknya lebih memperhatikan masalah-masalah tersebut di atas.

Kebijakan dan program

Kebijakan pokok pendidikan dasar

- Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar, dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil, dan terisolasi.
- Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dasar, sehingga setiap tamatan mempunyai kompetensi dasar yang dapat digunakan untuk hidup dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- Meningkatkan efisiensi manajemen pendayagunaan sumber daya pendidikan dan mengupayakan agar semua lembaga pendidikan dasar dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efisien dan efektif.
- Meningkatkan akses pendidikan dasar harus dilakukan bersama-sama dengan perbaikan mutu pendidikan. Dengan demikian, penuntasan program pendidikan dasar tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan mutu.

Strategi pelaksanaan untuk kebijakan di atas mencakup:

- Melaksanakan gerakan nasional penuntasan program pendidikan dasar dengan partisipasi semua kekuatan masyarakat, seperti orang tua, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia industri, dan usahawan, sehingga pelaksanaan penuntasan program ini betul-betul merupakan gerakan sosial (*community-based education*).
- Meningkatkan dan memperkuat program-program esensial yang telah ada untuk meningkatkan jumlah siswa masuk sekolah (*enrollment*). Sementara itu, program-program kegiatan yang kurang esensial agar dikaji ulang dan memobilisasi sumber daya yang mendukungnya untuk mempertahankan dan meningkatkan program pendidikan dasar.
- Memberikan peluang yang lebih besar kepada sekolah-sekolah swasta dan lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan dasar.
- Mengupayakan untuk menangani secara lebih efektif target-target masyarakat yang tidak terjangkau (miskin, terpencil, terisolasi) melalui pendekatan dan program pendidikan alternatif, untuk meningkatkan persamaan akses pendidikan dasar.
- Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar ditangani secara lokal, dengan memperhatikan setiap potensi dan tantangan yang ada, dengan memberikan kewenangan penuh dan tanggung jawab pelaksanaan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan didukung oleh pemerintah provinsi dan pusat.